



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 18 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Membahas Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2019 dan Kesiapan Pembiayaan Haji Tahun 2020.
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, Spt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 35 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Ketua Dewan Pengawas BPKH dan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.42 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua M.R.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas **“Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2019 dan Kesiapan Pembiayaan Haji Tahun 2020”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Dana kelolaan hingga Oktober 2019 sebesar Rp120,16 triliun dari target tahun 2019 sebesar Rp122 triliun.
 - b. Nilai Manfaat Tahun 2019 sebesar Rp7,2 Triliun.
 - c. Alokasi Virtual Account sebesar Rp1,08 Triliun.
 - d. Penyaluran Program Kemaslahatan Umat sebesar Rp176 miliar.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk menyampaikan laporan yang lebih rinci mengenai kinerja pengelolaan keuangan haji dan laporan kinerja Dewan Pengawas BPKH kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat 1 (satu) minggu sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk membahas rencana strategis investasi di Arab Saudi.
3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI dan BPKH untuk membahas pengecualian pajak atas dana haji.
4. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji tahun 2019 dan kesiapan pembiayaan haji tahun 2020, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk:
 - a. Meningkatkan capaian nilai manfaat investasi keuangan haji sebagai upaya mengoptimalkan kesiapan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang berkelanjutan.
 - b. Meninjau kembali sebaran penerima bantuan Kemaslahatan Umat dengan berlandaskan prinsip keadilan dan untuk kepentingan jemaah haji dan umat Islam.
 - c. Memprioritaskan penerima bantuan Kemaslahatan Umat sesuai dengan aspirasi daerah.
 - d. Meninjau kembali besaran alokasi Virtual Account bagi calon jemaah haji daftar tunggu.
 - e. Memperbaiki prosedur pengurusan pembatalan BPIH agar lebih cepat dan tidak memberatkan calon jemaah haji.
 - f. Menyampaikan rincian komponen BPIH Tahun 1441 H/2020 M kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan BPIH bersama Kementerian Agama RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.03 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, SPt.